

Hindari Risiko Dibui, Proyek Tidak Dilelang

HINGGA Juli permohonan lelang anggaran 2015 Kota Salatiga tercatat baru 17 persen dari total 175 lelang proyek yang tersebar di 26 satuan kerja perangkat daerah (SKPD); (SM, 9 Juli 2015). Ini berarti penyerapan anggaran masih rendah. Informasi itu disampaikan langsung Wali Kota Yuliyanto, dalam pertemuan dengan pelaku/praktisi pengadaan barang dan jasa dan SKPD di Gedung Dewan, baru-baru ini.

Masyarakat perlu tahu, bila lelang proyek gagal dilaksanakan, maka program pembangunan juga tidak berjalan. Maka *muspra* (sia-sia) sudah tahun anggaran ini karena ratusan proyek pembangunan. Ironis juga, karena menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto dan Wawali Muh Haris, ada sejumlah program pembangunan yang tidak berjalan (stagnan) dan lambat (tertatih-tatih).

Ada beberapa persoalan dan yang masih menjadi dilema utama SKPD takut menjalankan proyek-proyek tersebut. Apa pasal? Jawabannya sederhana, yakni tidak ingin masuk bui, karena berurusan dengan hukum. Di lapangan banyak kendala dan bukan rahasia umum, bila sejak lama banyak PNS enggan bersinggungan dengan lelang proyek. Bahkan ada beberapa PNS yang mengikuti ujian kompetensi dalam bidang pengadaan barang dan jasa, memilih menggugurkan diri, agar kelak tidak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

Memang ada beberapa yang berani masuk dan "bermain" di sekitar proyek karena bakal mendapat "kue". Namun lebih banyak yang enggan terlibat bila menerima konsekuensi, ada persoalan hukum. "Tidak hanya persoalan masuk bui, urusan dengan hukum sangat melelahkan, diperiksa sana - diperiksa sini, hingga persidangan dan menunggu vonis, telah membuat kehidupan semakin tidak nyaman," ujar salah satu PNS, yang pernah berurusan dengan hukum.

Keengganan mengurus proyek akhirnya semakin diperkuat, dengan persoalan di balik lelang/tender yang penuh intrik dan persengkongkolan, dengan melibatkan (maaf) para mafia proyek. Bukan menjadi rahasia umum dan kini banyak PNS yang

semakin tidak ingin terlibat. Kalau pun berada di lingkungan tersebut, lebih baik tidak dilaksanakan. Sekali lagi karena tidak ingin ada persoalan hukum di kemudian hari. Padahal kita tahu saat ini sistem lelang berbasis internet dan disiapkan agar dapat meminimalisasi terjadinya kongkalikong.

Ketakutan

Sejumlah lelang proyek besar, seperti pembangunan Gedung Setda Kota Salatiga yang nilainya sekitar Rp 23 miliar, selama dua tahun ini akhirnya batal dilelang. Ini sudah Bulan Agustus (apakah bisa selesai 4 bulan?). Okelah, kalau memang proyek tidak selesai dan diluncurkan tahun depan, namun menimbulkan ketakutan para pengambil kebijakan di tingkat PNS/SKPD.

Lalu ada lagi proyek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) senilai Rp 12 miliar, serta masih banyak lagi proyek-proyek dengan nilai besar (puluhan miliar rupiah). Kabarnya proyek ini batal dilelang. Bukan rahasia umum pula, bila beberapa proyek dengan nilai besar tersebut diduga sudah di-*ijon*-kan terlebih dahulu, alias sudah di-*senggekan* oleh sejumlah kontraktor. Modusnya dengan menyeteru uang ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah kepada pihak tertentu, dengan imbalan dijanjikan mendapat proyek itu. Diduga kuat uang tersebut mengalir ke sejumlah pengambil kebijakan. Kabarnya, uang setoran itu akan ditarik kembali para kontraktor, karena proyek tak kunjung dilelang pemkot. Atau akan dibayar/diganti oleh pemenang lelang, bila kontraktor pemberi upeti kalah.

Persoalan-persoalan lelang ini, yang semakin dikhawatirkan PNS atau SKPD untuk tidak juga menyelesaikan administrasi lelang proyek. Secara logika, mereka sudah memprediksi bakal ada persoalan hukum. Pengalaman membuktikan persoalan uang muka (*senggekan/upeti*) untuk mendapat proyek ini, bakal berimbas pada proyek. Dugaan kuat, modus kontraktor "nakal" mengurangi spek (spesifikasi) pembangunan. Bila ada temuan **BPK**, **BPKP**, dan lembaga pemeriksa sejenisnya, sudah pasti akan dilanjutkan dengan proses hukum. (Surya Yuli P-64)